

**IMPLEMENTASI PROGRAM ODF (*OPEN DEFECATION FREE*) OLEH PEMERINTAH DESA PURWASARI
KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2020**

Nindya Febrianti fauzi¹, H. Cecep Cahya Supena², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: nindyaff129@gmail;.com

ABSTRAK

Implementasi program ODF (Open Defecation Free) Oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020 belum berjalan optimal. Diantaranya tingginya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh akibat BABS di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, kurangnya dukungan edukasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam menerapkan jamban sehat di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, minimnya sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian Implementasi Program ODF (Open Defecation Free), serta faktor penghambat dan upaya Pemerintah Desa Purwasari dan Puskesmas Banjarsari dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program ODF. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian sebanyak 10 orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program ODF (Open Defecation Free) Oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan motivasi dan mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Faktor penghambat diantaranya masih terdapat kakus sebagai fasilitas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan realokasi anggaran. Upaya untuk mengatasi diantaranya dengan cara sosialisasi dan anggaran untuk program WC yang akan diberikan kepada masyarakat yang masih Buang Air Besar Sembarangan.

Kata Kunci : *Implementasi, Program, ODF (Open Defecation Free)*

PENDAHULUAN

Open Defecation Free (ODF) atau Tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan salah satu pilar dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh kementerian Kesehatan. Tujuan dari program ODF adalah untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan dan meningkatkan kualitas sanitasi, supaya angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dapat berkurang.

Upaya meningkatkan perilaku *higiene* dan meningkatkan akses sanitasi terus dikembangkan. Pemerintah Indonesia mengembangkan program *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yang lebih fokus pada perilaku Stop BABS menjadi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) terdiri dari 5 pilar yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, yang menentukan tentang 5 pilar tersebut meliputi:

- a) Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
- b) CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)
- c) PAM-RT (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)

d) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

e) Pengelolaan Limbah Air Rumah Tangga

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia masalah sosial budaya yang kritis. Perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarangan tempat merupakan kebiasaan yang harus segera dihentikan, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan *higiene* lainnya. Fenomena ini terjadi dimana-mana, kota maupun desa. Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun. Sebanyak 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya (*World Bank 2017*). Sanitasi buruk paling sering terjadi di daerah atau kabupaten terpencil karena ketiadaan tenaga terampil (UNICEP, 2017). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggaran terhadap sanitasi dan juga penyediaan tenaga terampil yang mampu mengedukasi masyarakat dari desa ke desa. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, *higiene* dan sanitasi masih sangat besar. Hal studi *Indonesia Sanitasi Sector Development Program* (ISSDP) tahun 2016, menunjukkan 27% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Program Desa ODF (*Open Defecation Free*) menjadi salah satu program di Desa Purwasari pada tahun

2020. Program ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang buang air besar sembarangan seperti di empang-empang, di sawah atau di kebun. Data yang peneliti terima dari Pemerintah Desa Purwasari Pos Kesehatan Desa Purwasari (PossKesDes), dari jumlah penduduk sebanyak 4.918 jiwa (1.615 KK) terdapat 171 Kepala Keluarga yang rentan BABS.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020 terlihat bahwa implementasi program *Open Defecation Free* (ODF) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020 belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tingginya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Akibat BABS di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
2. Kurangnya edukasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam menerapkan jamban sehat di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
3. Minimnya sarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
4. Belum terealisasinya pemberian bantuan bahan bangunan untuk

membangun WC/jamban sehat untuk masyarakat.

5. Perilaku masyarakat di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih banyak yang Buang Air Besar Sembarangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dari pemahaman dan permasalahan serta akibat yang dipaparkan di atas, pelaksanaan program Desa ODF sangat penting bagi masyarakat, maka dari itu peran Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa Purwasari sangat penting dan berguna bagi masyarakat yang kurang memahami pola hidup sehat dengan tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menetapkan judul “ **Implementasi Program ODF (*Open Defecation Free*) Oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020** ”

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Kata implementasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*to implement*” yang artinya mengimplementasikan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan

sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Mulyadi (2015:12) menyatakan bahwa: “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.” Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Jones (Mulyadi, 2015: 45) mendefinisikan implementasi, sebagai berikut: *‘Those Activities directed toward by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy’* (tindakan yang dilakukan pemerintah).

Salusu (Tahir, 2014: 55-56) menyatakan, ‘Implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.’ Pengembangan sumber daya manusia organisasi atau lembaga.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung proram-program yang akan dilaksanakan tersebut.

2. Pengertian Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya

terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Fredrich (Agustino, 2017: 166) 'Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Anderson (Agustino, 2017: 17) menyatakan bahwa: 'Serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan suatu kesatuan. sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. Impelemtasi Kebijakan

Menurut Anderson (Winarno, 2012: 21) bahwa: 'Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tetap karena memuatkan

perhatian pada yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.'

Menurut Wibawa (Tahir, 2014: 58), 'Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telag diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.'

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau di identifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dreskriptif kualitatif. Karena penelitian dreskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun jadwal penelitian direncanakan 10 bulan. Tempat penelitian ini di Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah implementasi program ODF (*Open Defecation Free*) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Puskesmas Banjarsari
- b. Kepala Desa Purwasari : 1
- c. Bidan Desa : 1
- d. Kasi Kesejahteraan : 1
- e. Kepala Dusun Purwasari : 1
- f. Kepala Dusun Mulyasari : 1
- g. Kepala Dusun Padomasari: 1
- h. Tokoh Masyarakat : 3

Data penelitian ini yaitu data implementasi program ODF (*Open Defecation Free*) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara (wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur).

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis data Kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program ODF (*Open Defecation Free*) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020 :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi diketahui belum optimal, hasil ditunjukkan pada indikator penyaluran komunikasi bahwa masyarakat hanya baru dilakukan survei untuk warga yang masih menggunakan kakus-kakus. Kemudian indikator kejelasan bahwa proses pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan,

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Komunikasi untuk melakukan metode komunikasi belum berjalan optimal, hal ini ditunjukkan oleh rata-rata responden tersebut diketahui bahwa dalam program Sanitasi atau ODF (*Open Defecation Free*) sejauh ini hanya dilakukan survei yang masyarakatnya masih menggunakan kakus-kakus sebagai tempat pembuangan akhir. Survei ini dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas Banjarsari, Aparatur Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat setempat.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ODF (*Open Defecation Free*) yaitu, sulitnya menjalin komunikasi yang diakibatkan banyaknya pekerjaan di masing-masing Instansi. Sehingga upaya yang dilakukan yaitu, dengan cara

percepatan program yang di komunikasikan dengan Bidan Desa sebagai jembatan antar kami (Pemerintah Desa).

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Mulyadi (2015: 12) bahwa:

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berdasarkan hasil observasi, hasil penelitian, dan teori ternyata pada

dimensi Komunikasi pelaksanaannya belum optimal dilihat dari beberapa indikator melalui contoh berbagai proses yang di Implementasikan oleh para pelaksana masih belum optimal.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya diketahui bahwa salah satu sarana dan prasarana yang menjadi prioritas utama dalam program ODF (*Open Defecation Free*) adalah WC. Pada dasarnya sarana dan prasarana bisa digunakan pada saat kegiatan dan juga acara tertentu. Untuk menyiapkan hal tersebut membutuhkan banyak sekali tangan yang harus ikut campur. Baik dari pihak penyediaan tempat dan juga kru dalam acara tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ODF (*Open Defecation Free*) belum terealisasinya pemberian bahan bantuan bangunan, karena sehubungan dengan adanya Pandemi *Covid-19* maka anggaran tersebut di refocusing kepada penanganan *Covid-19* sehingga pemberian jamban sehat tidak bisa dilakukan pada tahun 2020.

Menurut Suryo Subroto di dalam Arianto Sam (2012) "Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda – benda maupun uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas di ketahui bahwa fasilitas pendukung dalam implementasi program ODF (*Open Defecation Free*) sudah diberi oleh

pihak Pemerintah Desa. implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi disposisi diketahui bahwa pelaksana memberikan pelayanannya sudah optimal, pelaksana sudah melaksanakan tugasnya agar bisa berjalan optimal dengan cara mereka kompak dalam melaksanakan program kegiatan ini.

Menurut Moenir (2015: 27), 'Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat'.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas di ketahui bahwa dalam memberikan pelayanannya dilihat sudah cukup baik, yaitu dengan para pelaksana sudah mengawasi dalam dan memperhatikan ketika pelaksanaan program ODF (*Open Defecation Free*) ini sedang berjalan.

4. Standar Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa para pelaksana sudah melaksanakan apa yang tugasnya masing-masing, sehingga bertanggungjawab atas apa yang sudah

dilaksanakan ketika program ODF (*Open Defecation Free*) sedang berjalan sampai program kegiatan selesai.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menyatakan: 'Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi'.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori di atas di ketahui bahwa program ODF (*Open Defecation Free*) di Desa Purwasari sudah menjalankan apa yang seharusnya dilakukan ketika program ODF berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program ODF (*Open Defecation Free*) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tahun 2020 maka disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Program ODF (*Open Defecation Free*) oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis 2020 berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui belum optimal, hal itu dilihat dari beberapa dimensi yang masih belum berjalan dengan baik, terutama pada dimensi Komunikasi yang masih belum berjalan optimal.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Program ODF (*Open Defecation Free*) berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah masih terdapat

beberapa warga yang masih menggunakan kakus sebagai fasilitas Buang Air Besar Sembarangan, hal ini tentu menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Desa Purwasari, karena dampak yang ditimbulkan akan sangat beresiko bagi kesehatan masyarakat sendiri. Dan untuk anggaran buat sarana dan prasarana masih menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan program ODF.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi adalah dengan melakukan renovasi semua kakus yang masih menjadi fasilitas Buang Air Besar Sembarangan, yang akan diberikan kepada setiap warga yang masih memiliki kakus-kakus dan didanai oleh Dana Desa Purwasari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2008, 2017, 2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maleong, Lexy. J (2009, 2017, 2018). *Metode Penelitian Kuaalitatif*. Bandung Remaja.
- Solichin, Abdul Wahab (2004, 2008, 2020). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Subarsono (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Undang-undang

Permenkes No.3 Tahun 2014

Profil Desa Purwasari.